

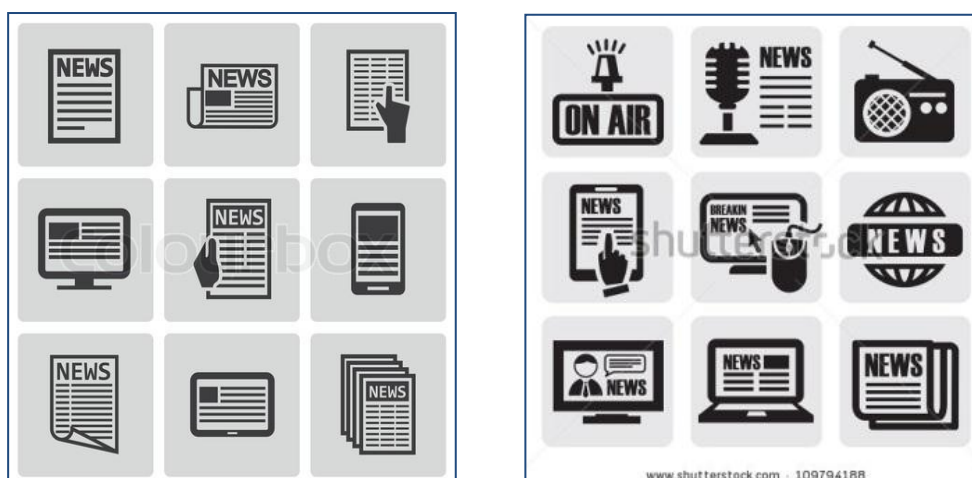


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 22 September 2014



**Pusat Data Informasi dan Rencana Pembangunan Nasional
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. PEMERINTAH BARU TARGETKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR (*Media Online Indonesia Finance Today*)



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & IOS di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 22 September 2014

Halaman 24, Kolom 1-5

Pemerintah Baru Targetkan Anggaran Infrastruktur Rp 6.552 Triliun

Anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7% per tahun.

J. Edo Nur Karensa

JAKARTA - Tim Transisi menyatakan pemerintah baru membutuhkan anggaran infrastruktur hingga Rp 6.552 triliun dalam lima tahun ke depan. Anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7% per tahun.

Akbar Falsal, Deputi Tim Transisi Bidang Infrastruktur, mengungkapkan pemerintah baru akan berupaya meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dalam seluruh ruang kerja infrastruktur, kami membutuhkan Rp 6.552 triliun selama lima tahun untuk mencapai pertumbuhan 7% per tahun," kata Akbar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, anggaran infrastruktur hanya Rp 160 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding anggaran tahun 2014 sebesar Rp 206,6 triliun dan tahun 2013 sebesar Rp 184,3 triliun.

Anggaran infrastruktur dirancang oleh pemerintah untuk membangun irigasi, waduk, dan tanggaman pantai sepanjang 22 kilometer. Kementerian Perhubungan juga berencana membangun lima bandara baru serta rehabilitasi 51 bandara.

Akbar mengungkapkan, pemerintah baru akan melibatkan swasta secara dominan untuk pembiayaan infrastruktur. Alokasi APBN, kata Akbar, hanya akan berkontribusi



Untuk mencapai target biaya logistik, pemerintah baru akan memperkuat penggunaan transportasi kereta api dan transportasi laut untuk mengatasi permasalahan logistik.

sekitar 15%-20% dari total belanja infrastruktur.

"Insentif yang kami siapkan untuk swasta adalah ada kepastian hukum dan kepastian aturan main bagi para investor," jelas Akbar.

Dia juga mengungkapkan target anggaran infrastruktur sebesar Rp 6.552 triliun ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun.

"Kami menginginkan biaya logistik bisa mencapai 12%-15%. Ini

masih belum baik di regional ASEAN, tapi kalau bisa 15% saja sudah baik," kata Akbar.

Pada 2012 dan 2013, biaya logistik nasional terhadap PDB mencapai 24,4% dan 25,2%. Pemerintah menargetkan biaya logistik pada tahun 2015 menembus 23,6%.

Untuk mencapai target biaya logistik, pemerintah baru akan memperkuat penggunaan transportasi kereta api dan transportasi laut untuk mengatasi permasalahan logistik. Double track Jakarta-Surabaya diharapkan mampu meningkatkan

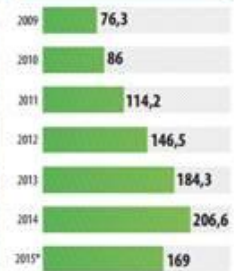
kapasitas hantaran sampai 14 ribu teus per minggu. Sementara untuk transportasi laut, pemerintah baru akan mempersiapkan tol laut dengan dua pelabuhan utama, yakni Bitung dan Sorong.

Target Optimistis

Rully Nova, Ekonom PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (SDRA), menilai target infrastruktur sebesar Rp 6.552 triliun adalah target yang optimistis. "Memang sebesar itu yang dibutuhkan untuk infrastruktur," kata dia.

Anggaran Infrastruktur 2009 - 2015

Dalam triliun rupiah



*RAPBN 2015

Sumber: Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan

Langkah yang perlu disiapkan pemerintah baru, menurut Rully, adalah membenahi regulasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan jangka panjang, pemerintah perlu meyakinkan investor mengenai konsensus dan komitmen nasional untuk infrastruktur.

Selain itu, perbankan perlu didorong untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. Selama ini, perbankan belum memberikan kontribusi yang cukup baik untuk pembiayaan jangka panjang.

"Menurut saya, tidak perlu effort yang begitu besar dari APBN untuk mendorong infrastruktur hingga ke angka Rp 6.552 triliun. Investor sebenarnya banyak tertarik, namun perlu jaminan supremasi dan kepastian hukum," pungkask Rully. ●

Anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7% per tahun

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#RKP(RencanaKerjaPemerintah)

#RAPBN2015

#ProdukDomestikBruto